

LAPORAN PUBLIK 2017-2018





LAPORAN PUBLIK

2017-2018

DAFTAR ISI

iv	Kata Pengantar Direktur Eksekutif INFID
vi	Kata Pengantar Ketua Dewan Pengurus INFID
viii	Testimoni
xii	Dewan Pengawas, Dewan Pengawas, Penasihat Ahli, Sekretariat INFID
1	INFID di Tahun 2017 dan 2018
4	INFID dalam Angka
7	Ringkasan
10	BAB 1. PENDAHULUAN
11	1. Analisis Konteks
14	2. Tentang INFID
16	BAB 2. CAPAIAN
17	1. Program Ketimpangan
20	2. Program SDGs
22	3. Program HAM dan Demokrasi
26	BAB 3. INFID DALAM MEDIA
27	Media Massa
29	Media Sosial
30	BAB 4. LAPORAN KEUANGAN
34	BAB 5. LAMPIRAN
34	Daftar Kegiatan INFID 2017-2018
40	Daftar Publikasi INFID 2017-2018

KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif INFID



Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena rahmat-Nya, kami terus bisa melakukan kegiatan sehari-hari, menjalankan mandat yang diberikan kepada INFID.

Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf di sekretariat INFID yang karena kerja kerasnya bisa menjalankan semua program dan rencana kerja hingga keluar dalam bentuk laporan sebagaimana Anda semua lihat dalam laporan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota dan Dewan Pengurus INFID yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh kepada kami di Sekretariat, sehingga semua program bisa terlaksana dengan baik.

Laporan yang Anda baca ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja INFID selama periode 2017–2018, yang meliputi kerja-kerja programatik di bidang SDGs, Ketimpangan dan HAM dan Demokrasi, serta kelembagaan dan keuangan. Program-program tersebut kami susun berdasar keputusan Pertemuan Umum Anggota (*General Assembly Meeting*) dan Pertemuan Strategis (*Strategic Meeting*) yang kami selenggarakan tiga tahun sekali.

Laporan ini kami susun dalam beberapa bagian, mulai dari analisa konteks, analisa dampak dan capaian per program, liputan media atas semua aktivitas INFID yang kami maksudkan untuk mengukur jangkauan kerja INFID, daftar kegiatan dan postur

keuangan yang kami dapatkan dan belanjakan selama dua tahun terakhir. Untuk memudahkan publik memahami laporan, selain kami paparkan dalam bentuk naratif laporan ini juga kami lengkapi dengan ilustrasi gambar dan info grafis.

INFID sadar bahwa apa yang kami lakukan sepanjang periode 2017-2018 masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun demikian kami yakin bahwa apa yang kami lakukan tersebut telah turut memberi kontribusi bagi proses pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, penegakan HAM HAM dan demokrasi, serta tujuan umum pembangunan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Lebih dari itu, INFID juga sangat terbuka terhadap masukan dari Anda semua untuk perbaikan kinerja INFID ke depan.

Selamat membaca!

Mugiyanto

Senior Program Officer
Human Rights & Democracy

KATA PENGANTAR

Ketua Dewan Pengurus INFID



Di usia ke 33 tahun, INFID terus menunjukkan relevansinya dengan pembangunan di Indonesia dan dinamika di tingkat global.

Pilihan program INFID didasarkan pada mandate dan Visinya sebagai organisasi yang mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), baik Hak Sipil Politik maupun Hak Ekonomi Sosial Budaya, serta untuk menjawab konteks terkini yang terus berkembang. Tiga program utama INFID adalah (1) HAM dan Demokrasi; (2) Penurunan Ketimpangan, dan (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Melalui Program HAM dan Demokrasi, INFID memperkuat peran negara dan peran warga negara dalam memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Berbagai dialog kebijakan dilakukan INFID untuk mendorong pemerintah merumuskan atau memperbaiki kebijakan agar selaras dengan HAM. Untuk mewujudkan Warga Negara aktif (*Active Citizenship*), INFID menyelenggarakan berbagai kegiatan yang membuka ruang bagi anggota, jejaring dan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam pembangunan, menjaga toleransi dan menangkal ekstremisme

Upaya menurunkan ketimpangan, diperjuangkan INFID melalui berbagai kegiatan riset, dialog kebijakan dan aksi, yang mendorong terwujudnya kerja layak berkeadilan dan kebijakan fiskal yang berkeadilan.

INFID mengambil tanggung jawab mendorong pemerintah mewujudkan tata kelola pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kemitraan setara dan tak seorang pun ditinggalkan.

Dalam merealisasikan program dan kegiatannya, INFID melibatkan perempuan, kaum muda dan kelompok rentan, sebagai kelompok strategis penentu keberhasilan pembangunan di masa kini dan masa depan. Kajian dan usulan kebijakan dilakukan dengan menggunakan perspektif keadilan sosial dan keadilan gender, untuk menghapuskan ketimpangan social-ekonomi serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan.

Laporan Publik INFID ini, disampaikan kepada anda, sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas INFID. Selamat membaca

Jakarta, Januari 2019

Dian Kartikasari

Ketua Dewan Pengurus

TESTIMONI

ANGGOTA, JARINGAN, MITRA



Nawawi Bahrudin, Direktur LBH Pers

Advokasi yang dilakukan INFID untuk isu ketimpangan, SDGs, dan *human rights* & demokrasi sangat relevan dengan kondisi aktual Indonesia. Hal ini juga mencerminkan kinerja sekretariat yang baik dalam pemilihan isu advokasi. INFID sebagai forum NGO telah kerja sama dengan anggota dan jaringan. Selain itu, INFID melakukan peran penguatan anggota dengan cara diskusi-diskusi perumusan program dan diskusi dan konsultasi program dengan donor. Semoga ke depan, INFID semakin dapat berkontribusi dalam advokasi agar pembangunan Indonesia yang demokratis dan menghormati HAM dapat terwujud.



Manambas Pasaribu, Direktur Bakumsu (Perhimpunan Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara)

INFID sebagai sebuah lembaga organisasi masyarakat sipil internasional yang saat ini sedang bekerja dalam isu SDGs, Ketimpangan, HAM dan Demokrasi harus terus meningkatkan kinerjanya dengan menggandeng anggota-anggotanya yang ada di daerah. Sebagai sebuah forum NGO, INFID diharapkan menjadi wadah masyarakat sipil untuk mendorong berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Harapan kami dalam kerja-kerja INFID ke depan dengan 3 tema besar yang saat ini dikerjakan dapat menggandeng, melibatkan partisipannya sehingga terbangun suatu gerakan bersama untuk mendorong perubahan yang lebih baik ke depannya.



Yuyun Ismawati, Pendiri dan Senior Advisor BaliFokus

INFID adalah forum internasional pemerhati Indonesia. Dengan 3 fokus utama INFID dan evolusi pendekatan yang dilakukan saat ini, peran INFID bukan hanya sebagai *watchdog* tetapi juga sebagai aktor perubahan, menjadi semakin penting dan strategis. Inisiatif-inisiatif dan inovasi para pemangku kepentingan di berbagai daerah ketimpangan, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat dan HAM, harus digaungkan, direplikasi dengan adaptasi sesuai kebutuhan, sehingga menjadi norma baru.

Harapan saya untuk INFID ke depan adalah bisa menjangkau praktik-praktik terbaik, inovasi-inovasi daerah dilengkapi dengan panduan-panduan yang relevan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.



Krissusandi Gunui, Direktur Eksekutif Institut Dayakologi

INFID diharapkan ke depan menjadi salah satu CSO kelas internasional memiliki pengaruh lebih konkret di level internasional bagi pembangunan dan pemberdayaan berkelanjutan di Indonesia. Berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketergantungan masyarakat terhadap pembangunan, di antaranya melalui riset sekaligus advokasi di kelompok komunitas yang sangat rentan di Indonesia serta bekerja sama dengan CSO lokal dengan konsep kolaborasi dan sinergitas dalam kerja-kerja pemberdayaan holistik.

Masalah utama dalam konteks masyarakat adat dan komunitas lokal di Kalimantan adalah kapasitas SDM dan krisis komoditas ekonomi alternatif sebagai penunjang keberlanjutan. Untuk itu, ke depan INFID dipandang perlu konsen pada peningkatan kapasitas masyarakat dan mendorong model ekonomi alternatif yang produktif, ramah lingkungan, berbasis kearifan dan pengetahuan lokal. INFID sebaiknya memperbanyak kerja sama program dengan CSO lokal atau anggota di lapangan agar hasil karyanya lebih membumi sekaligus mendunia.



Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minesa

Akhir-akhir ini berbagai permasalahan masyarakat Indonesia semakin kompleks. Isu dan persoalan SDGs, *gini ratio*, HAM hingga intoleransi, jelas membutuhkan penanganan lebih serius dari NGOs untuk mendorong kebijakan negara yang lebih realistis. INFID dalam konteks ini, mampu menempatkan diri dalam fungsi koordinasi untuk gerakan bersama. Walaupun demikian, jelas peran INFID penting untuk ditingkatkan lagi.



Y. W. Junardy, Presiden Indonesia Global Compact

Perjuangan HAM yang berkorelasi dengan sektor bisnis merupakan perjalanan yang panjang, terlebih untuk Indonesia dengan kompleksitas tantangan yang tidak mudah dibenahi secara komprehensif. IGCN telah berkolaborasi dengan INFID sejak beberapa tahun yang lalu dalam upaya mengarusutamakan konsep Bisnis dan HAM. Perjuangan bersama INFID memberikan banyak optimisme yang bukan sekedar wacana, namun merupakan langkah-langkah bersama secara konkrit dan efektif untuk memajukan pemenuhan HAM di sektor bisnis.

INFID dengan jejaring daerah yang sangat luas tentunya sangat membantu dalam setiap proses diseminasi konsep Bisnis dan HAM dalam lingkup nasional. Sepanjang tahun 2017-2018, INFID sangat baik dalam mengelola hubungan dengan jejaring di daerah, yang di mana menunjukkan bahwa INFID memiliki aspek integritas dan profesionalitas yang tinggi dan matang. Hubungan yang baik tersebut sangat membantu dalam setiap proses mengarusutamakan, tidak hanya dalam ranah Bisnis

dan HAM, namun juga dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara umum.

Kami mengharapkan hubungan yang baik tersebut dapat diteruskan secara konsisten sehingga perkembangan inisiatif global dapat diejawantahkan dalam aksi-aksi konkrit secara merata di Indonesia untuk pencapaian SDGs.



Ichal Supriadi, Secretary General of Asia Democracy Network (ADN)

INFID is Invaluable and Trustable Partner in Promotion and Defend Democracy - INFID's work at multiple democracy and development front deserve appreciation for its achievement. My engagement at Human rights festival 2018 which held recently in Wonosobo, Central Java which co-hosted by INFID. I learnt harmony between efficiency and wisdom by engage grass-root people in the human rights event like this, it's a milestone that can be continue in the future. I saw INFID's professional engagement in other international arena like human rights cities, Gwangju human rights forum, Community of Democracy (CoD), Open Government Partnership (OGP), and in the Sustainable Development Goal sectors, as well as within the Asia Democracy Network (ADN) circle. INFID has reach unique level of achievement, not only a common player/ implementor but also become consolidators that able to leverage its partnership approach and motivate different parties, consolidates in the sub-national, national and international stakeholders as INFID proven efficient in streams the strategic issues on the field of democracy, human rights and development.

I believed INFID will continue its good works in the coming future, to be able to leverage its reach to the next level for the benefits of the government to keep respect and practicing the rights, and increase accountability and excellent service oriented to increase social justice. INFID is invaluable asset in future promotion of democracy, and trustable allies to defend democracy. I wish INFID success for the upcoming years.



Prof. Shin Gyonggu, Gwangju International Center

I heard of INFID while attending the World Human Rights Cities Forum (WHRCF) which began to take place in Gwangju since 2011. INFID has been the active participant of the forum. I was more impressed by INFID while attending international conferences. I attended many international or national events the INFID is organizing, and they were smoothly managed without exception. I had no problem in communication with the staff. I know that only proper combination of competence and dedication can produce such a high performance.

In addition, I was impressed by the ability of mobilization of both the government

and non-governmental sectors in its event. The INFID network seems to be its major asset which cannot be imitated by others easily. Still the biggest asset of INFID is its professionalism. Its staffs are not simply managing events. They are experts in business development, international affairs, conflict management, and human rights among others. The Indonesian people are lucky to have INFID inside their territory.



Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI

INFID menjadi salah satu mitra kerja dari organisasi masyarakat sipil yang penting dan strategis bagi Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa kerja sama dalam bidang hak asasi manusia telah dijalin oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen HAM dengan INFID, antara lain dalam penyusunan naskah akademik. Di samping itu, INFID juga membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan indikator uji tuntas bisnis dan HAM, kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan acuan dalam penerapan norma-norma HAM pada berbagai operasi Bisnis di Indonesia, serta mempromosikan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR). Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan kerja sama dengan INFID.

DEWAN PENGURUS



Dian Kartikasari
Ketua



Totok Yuliyanto
Wakil Ketua



Teddy Alfonso
Bendahara



Nawawi Bahrudin
Sekretaris



Odi Shalahuddin
Anggota



Suryati Simanjuntak
Anggota



Sarah Lerry Mboeik
Anggota

DEWAN PENGAWAS



Khairani Arifin
Flower Aceh



Puspa Dewi
Solidaritas
Perempuan



Istiatun
Yasanti Yogyakarta

PENASIHAT AHLI



**Zumrotin K
Susilo**
Penasihat Ahli



M. A. S. Hikam
Penasihat Ahli



**Mickael B.
Hoelman**
Penasihat Ahli



**Dr. Bagus
Takwin**
Penasihat Ahli



**Dr. Aris Arif
Mundayat**
Penasihat Ahli

SEKRETARIAT INFID

DIVISI PROGRAM



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif



Mugiyanto
Senior Program Officer
Human Rights &
Democracy



Hamong Santono
Membership &
Partnership Officer



Lola Loveita
Program Officer Human
Rights & Democracy



Bona Tua P. P.
Program Officer
SDGs



Aulia Rachmah Putri
Program Assistant Human
Rights & Democracy



**Nindhitya
Nurmalitasari**
Communications &
Digital Officer



Megawati
Program Assistant
Inequality



Nadia Yunita
Program Assistant
Human Rights &
Democracy (PVE)

KEUANGAN



**Robert
Pramudarto**
Direktur Keuangan



Misnawati Syamsir
Manager Keuangan



Ima Desiyanthi
Finance & Accounting



Nidia Viska
Finance & Budgeting

HUMAN RESOURCE



Florence
Human Resource
Manager



Suwarno Joyomenggolo
Logistic & IT Officer



Jeckson Robinson
Program Assistant

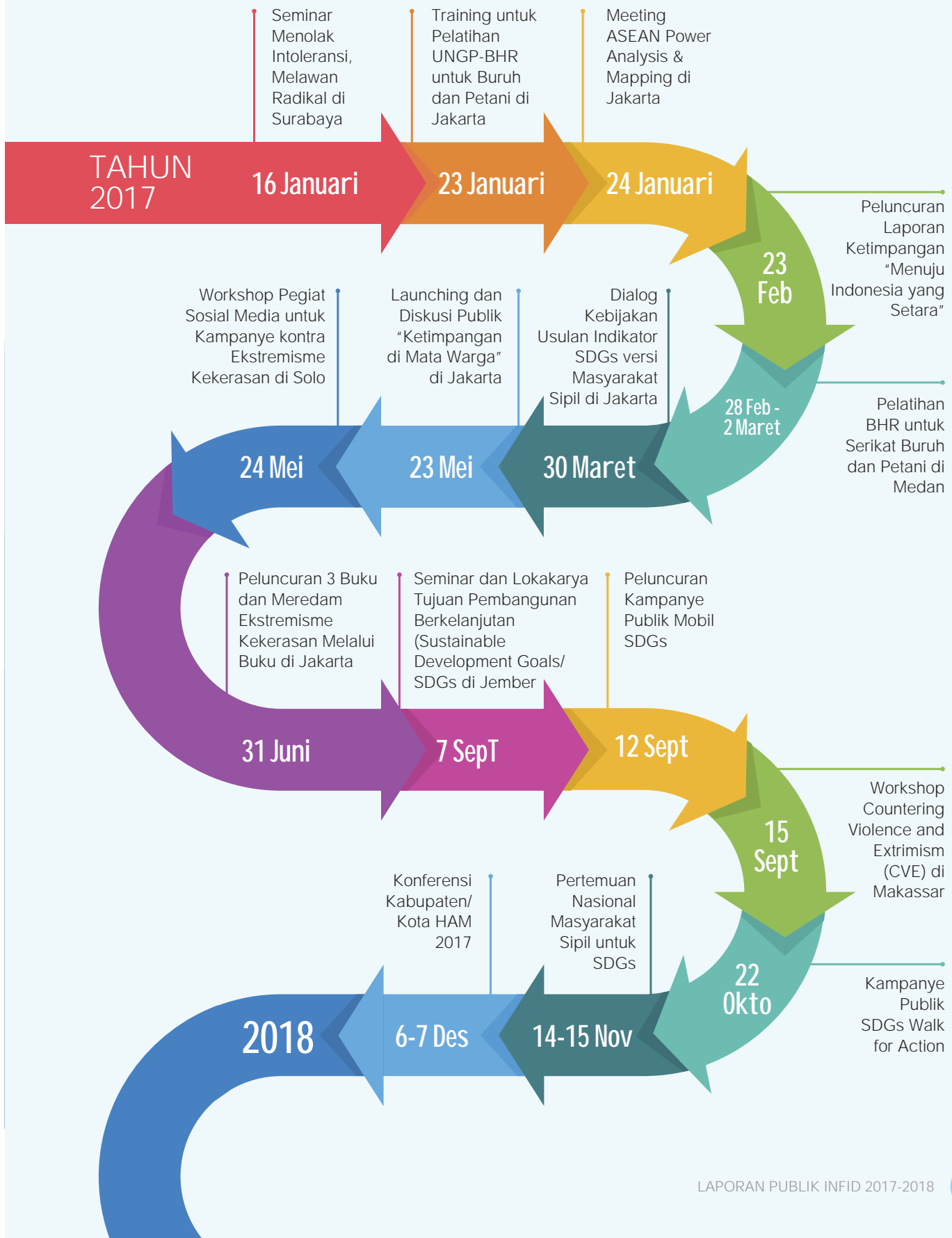


Sabarno
Operations Officer

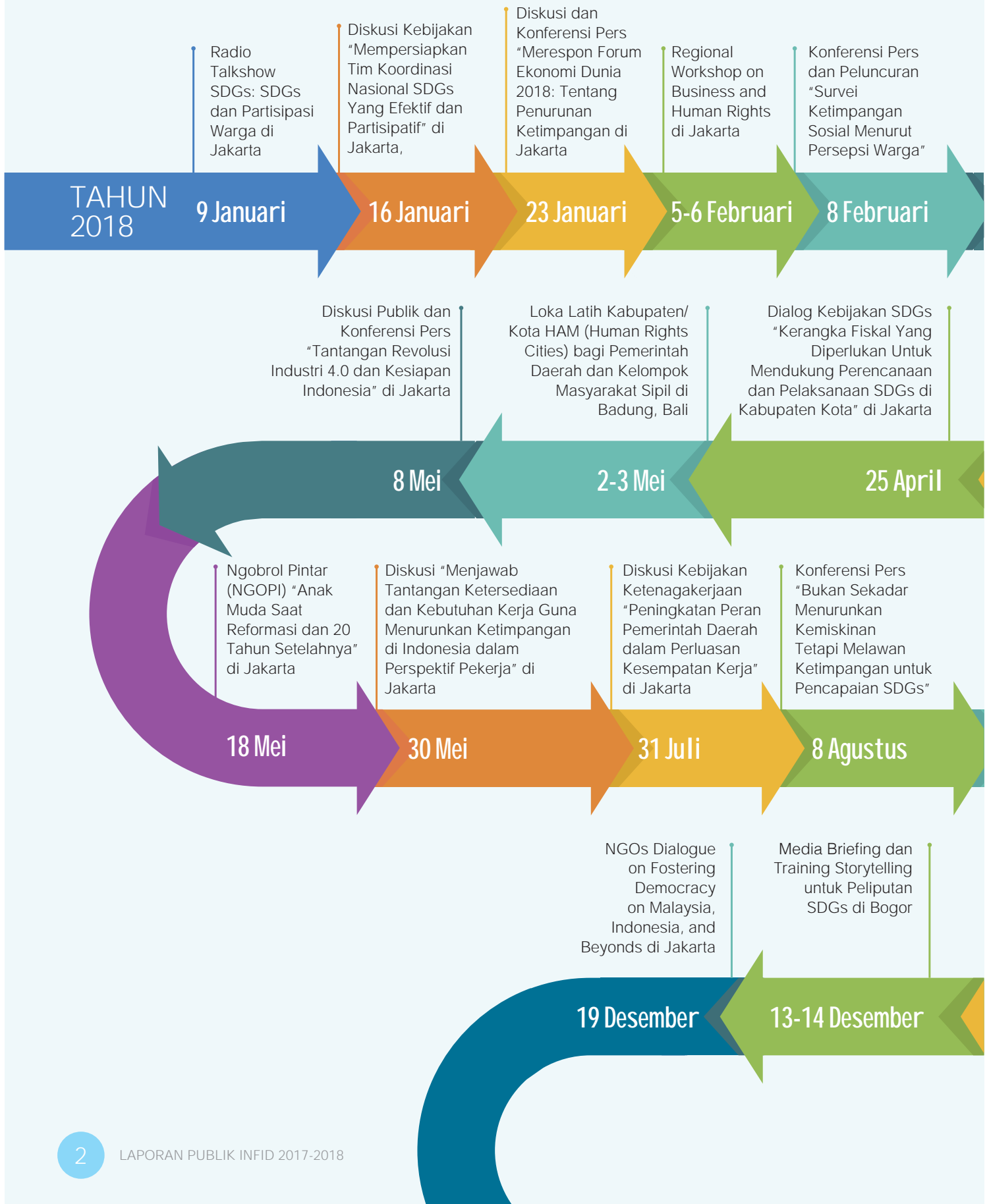


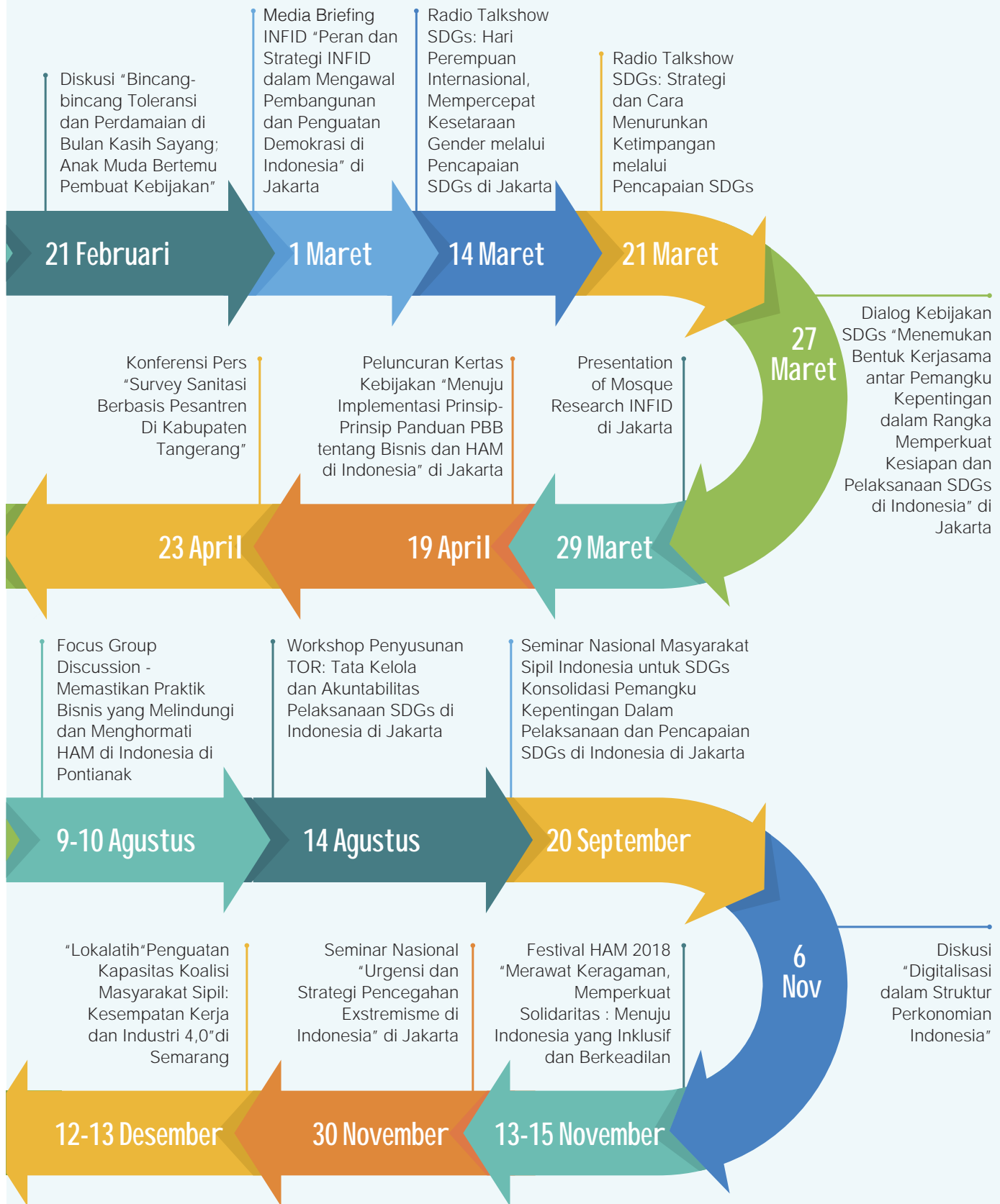
Wasiton
Operations Officer

INFID DI TAHUN 2017

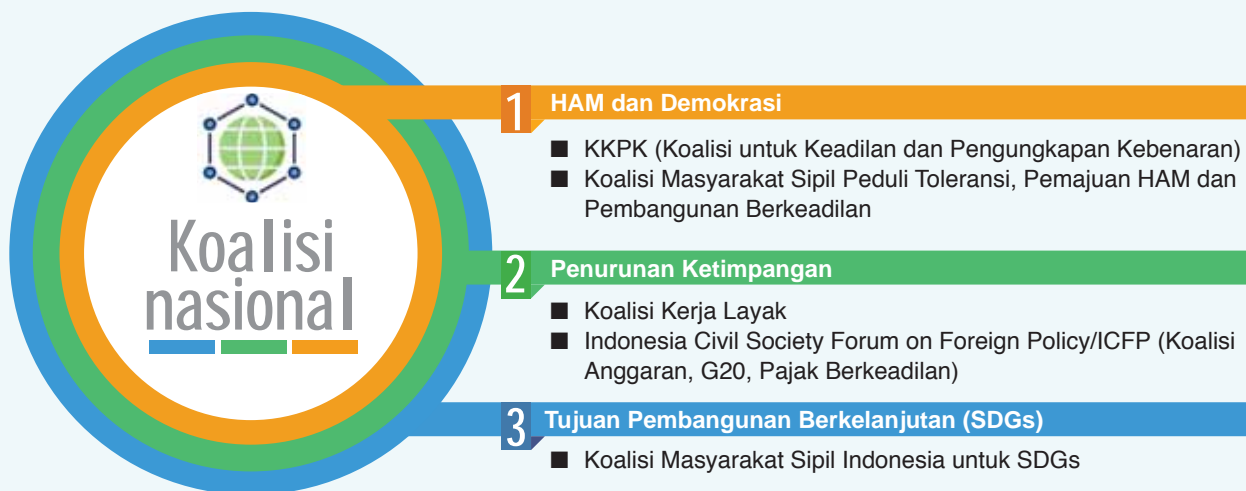
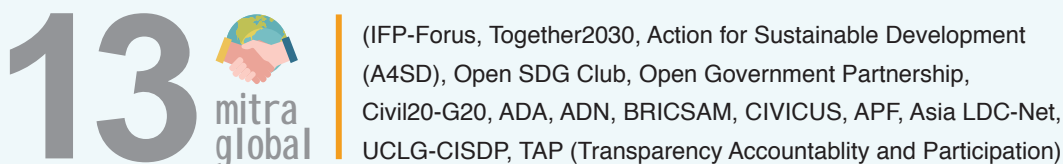


INFID DI TAHUN 2018





INFID DALAM ANGKA





Liputan Media Massa

2017 **243**

2018 **582**

Aktivitas 2017-2018

88

Mengelola Dana

2017 **Rp 13.190.005.236**

2018 **Rp 14.998.403.000**

pengikut Media Sosial

7.214

3.354

1.503



7 MoU

di lakukan sekretariat
INFID sepanjang 2017-2018

Mitra Kerja 2017-2018:

- Pemkab Wonosobo
- Kantor Staf Presiden (KSP) RI
- Komnas HAM
- NED (National Endowment for Democracy)
- Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
- Indonesia Global Compact Network (IGCN)
- Pemkab Jember
- Oxfam di Indonesia
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- Program Mampu
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Hukum dan HAM
- Jaringan Gusdurian Indonesia
- NU Online

RINGKASAN





Tahun 2017-2018 INFID menjalankan 3 program yaitu Penurunan Ketimpangan, HAM dan Demokrasi, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Ketiga fokus kerja INFID ini meneruskan program sebelumnya di tahun 2016.

Pada periode 2017-2018 situasi politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia maupun global menghadapi berbagai tantangan. Situasi nasional Indonesia sepanjang 2017-2018 ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah. Indonesia juga akan segera menghadapi pemilu presiden (pilpres) tahun 2019.

Penyelenggaraan pilkada di banyak daerah serta dimulainya persaingan menuju Pilpres 2019 di satu sisi menunjukkan berjalannya demokrasi di Indonesia. Tetapi di sisi lain, pilkada juga kerap menimbulkan dampak yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi itu sendiri. Beberapa fenomena yang perlu menjadi perhatian antara lain tren kenaikan intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan serta penggunaan politik identitas dan ujaran kebencian untuk kepentingan politik elektoral.

Sementara itu, di tahun 2018 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang direncanakan terwujud pada tahun 2030 telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi dan berkomitmen melaksanakan SDGs

telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dan membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN) untuk implementasi SDG. Namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah, antara lain masih belum terbentuknya peta jalan dan pendanaan bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Indonesia juga perlu mempersiapkan Voluntary National Review (VNR) pada tahun 2019.

Kemudian meski angka kemiskinan menurut BPS menurun sebesar 9,82 persen pada Maret 2018, Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan di berbagai aspek. Mulai dari ketimpangan pendapatan, kekayaan, gender, antarwilayah, desa-kota, maupun ketimpangan kesempatan seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, maupun akses atas layanan kesehatan dan sanitasi yang berkualitas. Indonesia dituntut memiliki langkah konkret untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif revolusi industri keempat terhadap tenaga kerja.

Di samping itu, di level internasional muncul beberapa tantangan, antara lain meningkatnya tensi geopolitik dan tren populisme di seluruh dunia. Konflik antarnegara (*interstate conflict*) dan konflik di dalam negara (*intrastate conflict*) masih banyak terjadi dan mengancam keamanan global, serta mengakibatkan maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, keadaan ekonomi politik internasional juga diwarnai dengan proteksionisme dan persaingan negara-negara besar, khususnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pada saat yang sama, efektivitas institusi multilateral dalam memudahhi kerja sama maupun penyelesaian sengketa antar-negara juga dipertanyakan.

Instabilitas ekonomi politik ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global, pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan penghapusan ketimpangan, utamanya bagi negara-negara berkembang. Padahal dunia juga harus mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari revolusi industri keempat dan perkembangan ekonomi digital seperti hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi dan tantangan siber lainnya.

Di tengah kondisi nasional dan internasional yang tidak selalu kondusif, INFID tetap menjalankan perannya untuk mengawal 3 isu besar dengan berbagai kegiatan advokasi, kajian, kampanye, edukasi publik dan lain sebagainya.

Pada tahun 2017, INFID meluncurkan Laporan Ketimpangan “Menuju Indonesia yang Setara” yang menjadi rujukan untuk mengetahui kondisi dan urgensi untuk mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia. INFID juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi Revolusi Industri Keempat melalui pendidikan keterampilan bagi para pekerja, serta mendorong pendanaan dan pajak yang adil untuk mengurangi ketimpangan.

Pada isu SDGs, INFID berkontribusi menyusun Rencana Aksi dan Indikator Keberhasilan SDGs versi Masyarakat Sipil dan mengadakan berbagai diskusi, seminar, dan lokakarya untuk mendorong implementasi Tujuan Pembangunan Pembangunan di Indonesia. INFID juga melakukan pendampingan untuk mempercepat pelaksanaan pencapaian SDGs di berbagai daerah di Indonesia, mendorong terbentuknya peta jalan serta pendanaan untuk SDGs.

Di isu HAM dan Demokrasi INFID terus memastikan pelaksanaan dan penghormatan HAM di sektor bisnis, pelaksanaan kabupaten/kota HAM, dan pencegahan ekstremisme dengan kekerasan. INFID aktif melakukan kajian dan penelitian, penguatan kapasitas, kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, advokasi kebijakan, serta kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Beberapa upaya yang menonjol antara lain Konferensi HAM 2017 dan 2018, loklatih Kabupaten/Kota HAM bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil, penelitian tentang “Tren Intoleransi pada Beberapa Masjid di BUMN dan Perguruan Tinggi”, dan lain sebagainya.

BAB 1 | PENDAHULUAN





1. Analisis Konteks

Pada periode 2017-2018 situasi politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia maupun global menghadapi berbagai tantangan. Situasi nasional Indonesia sepanjang 2017-2018 ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah. Di tahun 2017, pilkada dilakukan di 101 daerah, sementara Pilkada Serentak 2018 dilakukan di 171 daerah. Indonesia juga akan segera menghadapi pemilu presiden (pilpres) tahun 2019.

Penyelenggaraan pilkada di banyak daerah serta dimulainya persaingan menuju Pilpres 2019 di satu sisi menunjukkan berjalannya demokrasi di Indonesia. Tetapi di sisi lain, pilkada juga kerap menimbulkan dampak yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi itu sendiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tren kenaikan intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan di Indonesia. Sebagai contoh di tahun 2017, khususnya pada putaran kedua Pilkada Gubernur DKI Jakarta, isu suku, agama, ras, dan golongan (SARA) kerap dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan sentimen negatif dan perpecahan. Penggunaan ujaran kebencian dan kasus persekusi juga banyak terjadi di berbagai daerah. Hal ini juga dikonfirmasi oleh berbagai hasil riset yang dilakukan INFID di skala lokal dan nasional.

Sementara itu, di tahun 2018 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang direncanakan terwujud pada tahun 2030 telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi dan berkomitmen melaksanakan SDGs telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dan membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN) untuk implementasi SDG pada 4 Juli 2017. Namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah, antara lain masih belum terbentuknya peta jalan dan pendanaan bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Indonesia juga perlu mempersiapkan Voluntary National Review (VNR) pada tahun 2019.

Di samping itu, meski angka kemiskinan menurut BPS menurun sebesar 9,82 persen pada Maret 2018, Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan di berbagai aspek. Mulai dari ketimpangan pendapatan, kekayaan, gender, antarwilayah, desa-kota, maupun ketimpangan kesempatan seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, maupun akses atas layanan kesehatan dan sanitasi yang berkualitas. Sepanjang 2017-2018 kondisi ekonomi Indonesia juga cukup terpengaruh dengan dinamika ekonomi global, ini juga terlihat dari nilai tukar rupiah yang sempat mengalami pelemahan.

Tahun 2017 dan 2018 juga adalah tahun ketiga dan keempat dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama periode tersebut pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan di berbagai wilayah. Pesatnya pembangunan infrastruktur selain memberi efek positif pada perekonomian, tetapi juga ada dampak negatif yang kurang tertangani dengan baik. Seperti konflik agraria, marjinalisasi masyarakat lokal, dan dalam beberapa kasus justru memperlebar ketimpangan. Dalam dua tahun ini juga, ekonomi digital didorong cukup kencang oleh pemerintah maupun industri. Indonesia dituntut memiliki langkah konkret untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif revolusi industri keempat terhadap tenaga kerja.

Pada konteks internasional muncul beberapa tantangan, antara lain meningkatnya tensi geopolitik dan tren populisme di seluruh dunia. Konflik antarnegara (*interstate conflict*) dan konflik di dalam negara (*intrastate conflict*) masih banyak terjadi dan mengancam keamanan global. Contohnya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Fenomena tersebut



kerap menimbulkan berbagai masalah seperti peningkatan arus migrasi global dan krisis pengungsi, maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM, perdagangan manusia, dan berbagai permasalahan lain. Hal ini diperparah dengan maraknya kebijakan-kebijakan populis dan penggunaan ujaran kebencian yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi seperti kebijakan anti-imigran yang disuarakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Selain itu, keadaan ekonomi politik internasional juga diwarnai dengan proteksionisme dan persaingan negara-negara besar, khususnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pada saat yang sama, efektivitas institusi multilateral dalam memudah kerja sama maupun penyelesaian sengketa antar-negara juga dipertanyakan. Terutama setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan keluarnya AS dari berbagai kesepakatan internasional seperti perjanjian perdagangan *Trans Pacific Partnership* (TPP).

Instabilitas ekonomi politik ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global, pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan penghapusan ketimpangan, utamanya bagi negara-negara berkembang. Padahal dunia juga harus mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dari revolusi industri keempat dan perkembangan ekonomi digital seperti hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi dan tantangan siber lainnya.

Di tengah kondisi nasional dan internasional yang dapat dikatakan tidak sepenuhnya kondusif, INFID tetap menjalankan perannya untuk mengawal 3 isu besar dengan berbagai kegiatan advokasi, kajian, kampanye, edukasi publik dan lain sebagainya. INFID juga berkomitmen mengawal isu SDGs, Ketimpangan, serta HAM dan demokrasi dengan membangun jejaring dan kerja sama di tingkat regional maupun internasional. Sebagai contoh, INFID menjadi *focal point* C20 dari Indonesia (dalam rangka G20) dan terlibat dalam penyelenggaraan forum masyarakat sipil untuk merespons Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali (2018).



2. Tentang INFID

Usia INFID pada tahun 2018 menginjak 33 tahun. Sebuah usia dewasa bagi sebuah lembaga. Lembaga yang sudah berdiri sejak masa Orde Baru dan sekarang masuk Orde Reformasi, tentu tantangan zamannya berbeda. Dengan keanggotaan sebanyak 69 lembaga, INFID makin ditantang untuk mewujudkan visinya yakni mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.

Dengan visi di atas, beberapa misi INFID dirumuskan: (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik; (2) Melakukan penelitian dan

kajian kebijakan; (3) Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian; dan (4) Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

Dalam 3 tahun terakhir ini, untuk mewujudkan misi INFID, ada 3 program utama yang dijalankan. Ketiga program ini adalah: (1) HAM dan Demokrasi; (2) Penurunan Ketimpangan, dan (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (Sustainable Development Goals). Ketiga program dinilai masih relevan di era 20 tahun reformasi Indonesia di mana proses pengarusutamaan HAM, pembangunan berkelanjutan serta pengentasan ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan masih dibutuhkan oleh semua.

BAB 2 | CAPAIAN





1. Program Ketimpangan

Indonesia menduduki peringkat enam terburuk dunia dalam soal ketimpangan (Riset INFID dan OXFAM, 2017). Indonesia berada di bawah Rusia, Denmark, India, Amerika, dan Thailand. Data menunjukkan 4 orang terkaya Indonesia menguasai setara kekayaan 100 juta orang termiskin.

Merujuk pada indikator rasio gini (mengukur ketimpangan), Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi 0,389 (Maret 2018) meskipun angka ini yang terendah dalam satu dasawarsa terakhir (tertinggi 0,414 pada September 2011).

Di samping itu, meski angka kemiskinan menurut BPS menurun sebesar 9,82 persen pada Maret 2018, Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan di berbagai aspek. Mulai dari ketimpangan pendapatan, kekayaan, gender, antarwilayah, desa-kota, maupun ketimpangan kesempatan seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, maupun akses atas layanan kesehatan dan sanitasi yang berkualitas.

Salah satu sebab ketimpangan adalah pasar tenaga kerja yang tidak sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki para pekerja. Berdasar data BPS (Februari 2018), dari jumlah tenaga kerja sebanyak 133,94 juta, 59,80% adalah mereka yang lulusan SMP ke bawah (lulus/tidak lulus SMP

dan lulus/tidak lulus SD). Sehingga mereka sulit untuk diserap dalam pasar tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Kerentanan tenaga kerja ini kian bertambah dengan revolusi industri dan perkembangan ekonomi digital yang berpotensi menggeser tenaga kerja manusia dengan robot.

Tahun 2017 dan 2018 juga adalah tahun ketiga dan keempat dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama periode tersebut pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan di berbagai wilayah. Pesatnya pembangunan infrastruktur selain memberi efek positif pada perekonomian, tetapi juga ada dampak negatif yang kurang tertangani dengan baik. Seperti konflik agraria, marginalisasi masyarakat lokal, dan dalam beberapa kasus justru memperlebar ketimpangan.

Sepanjang 2017-2018 kondisi ekonomi Indonesia juga cukup terpengaruh dengan dinamika ekonomi global, terutama dengan adanya perang dagang dari AS-China. Ini terlihat dari nilai tukar rupiah yang sempat mengalami pelemahan.

Peran dan Posisi INFID

Mengingat dimensi ketimpangan yang begitu luas, mulai dari soal pendapatan sampai soal akses kesehatan, maka INFID melakukan survei persepsi publik terhadap ketimpangan pada tahun 2017. Hasil survei ini menunjukkan 84% publik mengaku mengalami ketimpangan. Hasil ini menguatkan hasil riset Credit Suisse maupun indikator rasio Gini.

Riset INFID menunjukkan 8 dari 10 orang mengatakan ada ketimpangan. Dari 2.250 responden, ada ranah ketimpangan yang tertinggi yaitu penghasilan (71,1%). Ketimpangan penghasilan menjadi persepsi kuat masyarakat dibandingkan misal ranah ketimpangan di bidang hukum (45%) atau kesehatan (42,3%).

Dalam tahun 2017-2018, INFID melakukan kajian-kajian tentang pasar tenaga kerja dan kebutuhannya. Salah satu penyebab ketimpangan adalah adanya gap antara kebutuhan lapangan kerja dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Lewat kajian-kajian ini, INFID melihat peluang memperbaiki pendidikan vokasi untuk



memperkecil gap kebutuhan tenaga kerja dengan kemampuan yang ada.

Salah satu capaian adalah selesainya "Kertas Kerja 6 Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi." Kertas Kerja ini kemudian menjadi masukan untuk pemerintah, karena menunjukkan beberapa kekurangan vokasi Indonesia selama ini dan bagaimana rekomendasi perbaikan ke depan. Dan pada tahun 2018 ini pemerintah membuat Road Map Pendidikan Vokasi, di mana INFID turut serta dalam pembahasannya.

Gaug kesadaran pentingnya pendidikan vokasi juga terlihat dari alokasi anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Tahun 2018, anggaran untuk pendidikan vokasi naik lebih dari 5 triliun rupiah. Ini peningkatan 25% dari anggaran tahun 2014 yang hanya 4 triliun rupiah. Setidaknya ini menunjukkan ada komitmen dari pemerintah pada pendidikan vokasi.

INFID bekerja sama dengan beberapa NGO, mendorong kegiatan di daerah-daerah tentang pentingnya pendidikan vokasi dan tantangan ketenagakerjaan dengan revolusi industri 4.0. Bagaimana kesiapan Indonesia, pemerintah daerah dalam menghadapi ekonomi digital. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Kulonprogo, Tuban, Gunungkidul, dan Bojonegoro.

Kampanye pendidikan vokasi ini baru upaya awal dari INFID untuk memecahkan persoalan ketimpangan dengan program yang lebih konkret. Sekaligus ini selaras dengan program SDGs, khususnya tujuan nomor 10 yaitu mengurangi ketimpangan.



2. Program SDGs

Di tahun 2018 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang direncanakan terwujud pada tahun 2030 telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi dan berkomitmen melaksanakan SDGs telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dan membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN) untuk implementasi SDG pada 4 Juli 2017.

Namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah, antara lain pertama, masih belum rampungnya peta jalan bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Kedua, belum ada skema pendanaan yang jelas untuk program-program yang mendorong pelaksanaan SDGs di Indonesia. Ketiga mengatasi ego sektoral antarinstansi pemerintah dan memastikan pelibatan masyarakat sipil dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan SDGs di Indonesia.

Peran dan Posisi INFID

Konsep dasar pelaksanaan SDGs adalah kerja sama semua sektor, baik pemerintah, masyarakat sipil maupun kalangan bisnis. Sementara itu di Indonesia sampai tahun 2017 belum ada kejelasan pelaksanaan SDGs dari pemerintah, maka INFID berinisiatif mengambil peran dalam masyarakat sipil.

INFID bersama masyarakat sipil lainnya, sejak tahun 2017 melakukan advokasi agar pelaksanaan SDGs dilakukan secara multipihak dan *no one leave behind*. Maka capaian di tahun 2018 ini muncul Keputusan Menteri PPN/Bappenas no 64/2018 tentang Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar Pembangunan Berkelanjutan. Dalam tim ini, INFID berada di Pilar Hukum dan Tata Kelola dan pada tujuan ke-16. Tim koordinasi, pelaksana dan pokja lahir sesuai harapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti universitas, kelompok agama, privat, filantropi, masyarakat sipil, masyarakat marjinal atau yang rawan tertinggal

INFID dalam program SDGs ini melakukan beberapa kali kegiatan diseminasi tentang SDGs bagi pada pemerintah (daerah) maupun masyarakat sipil. Tercatat ada 5 kali FGD (*focus group discussion*), 4 kali workshop dan 2 kali diskusi/seminar. Seminar dan Lokakarya dilaksanakan di Kabupaten Jember pada September 2017, mempromosikan SDGs pada arah pembangunan daerah terutama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Beberapa FGD maupun workshop di atas bertujuan untuk merumuskan indikator keberhasilan SDGs versi masyarakat sipil. Dan demi memudahkan penilaian pelaksanaan SDGs di Indonesia, INFID juga tengah membuat rumusan tata kelola dan alat monitoring akuntabilitas pelaksanaan SDGs. Ini diharapkan dapat digunakan pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada pelaksanaan SDGs.

Sementara itu, di level daerah beberapa workshop dengan pemerintah daerah mulai berdampak positif. Di antaranya dengan lahirnya Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah untuk pembentukan Tim Pelaksana maupun Kelompok Kerja (Pokja) SDGs di daerah-

daerah (kabupaten/kota) mitra INFID, seperti di Kabupaten Pangkep, Banda Aceh, Kupang pada tahun 2018.

Selain advokasi di level kebijakan, INFID juga mendorong implementasi tujuan-tujuan di SDGs di wilayah tertentu. Salah satunya adalah kegiatan *baseline* studi sanitasi pesantren INFID-GP Ansor di Kabupaten Tangerang. Hasil studi ini direspons positif oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, dengan tindak lanjut pembangunan dan perbaikan sanitasi 46 pesantren di 2018, dan akan dilanjutkan di pesantren lainnya pada tahun anggaran berikutnya. INFID juga aktif melakukan kampanye di media massa maupun media sosial untuk menyosialisasikan isu-isu SDGs kepada publik.



3. Program HAM dan Demokrasi

Sepanjang tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2018 yang juga menandai 20 tahun reformasi Indonesia, penegakan HAM dan Demokrasi mengalami tantangan. Meski sejauh ini telah ada reformasi kelembagaan, pemilu langsung dari tingkat pusat sampai desa, otonomi daerah yang luas, berdirinya lembaga-lembaga baru sektor HAM, anti korupsi, ratifikasi hampir semua konvensi HAM PBB, dan lain-lain, muncul beberapa tren yang mengancam HAM dan demokrasi di Indonesia.

Pertama, maraknya penggunaan ujaran kebencian dan politik identitas. Salah satunya tercermin dalam Pilkada Serentak 2017 di mana penggunaan isu agama, sentimen suku, ataupun politik identitas lainnya sangat kental dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung para calon kepala daerah. Fenomena yang mencolok dan menjadi *tipping point* bagi keberhasilan kelompok-kelompok radikal berbasis agama dan penggunaan ujaran kebencian untuk mencapai tujuan politik menggunakan sentimen ras dan agama adalah Pilkada di DKI Jakarta.

Ini juga menunjukkan bahwa demokrasi dimanfaatkan pula oleh kelompok anti-demokrasi untuk tumbuh dan berkembang, khususnya kelompok-kelompok radikal berbasis agama maupun politik. Beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok tersebut mulai berani mengekspresikan aspirasinya, baik secara damai dengan menggunakan jalur-jalur demokrasi, maupun dengan cara-cara non-demokrasi dengan kekerasan untuk menyatakan penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, tren intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan juga semakin meningkat. Hal ini dikonfirmasi oleh berbagai riset, salah satunya riset INFID "Persepsi dan Sikap Anak Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan" (2016) yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak muda setuju bahwa kelompok minoritas agama harus dibubarkan karena dianggap sesat.

Gejala-gejala ini berpotensi mencederai demokrasi dan HAM, termasuk mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan berbicara dan berpendapat, dan lain sebagainya. Peristiwa besar yang menjadi eskalator menguatnya tren ini khususnya di wilayah regional adalah kemunculan ISIS. Sebagai negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi negara yang rentan terkena dampak dari fenomena tersebut.

Selain itu, pelanggaran hak asasi di bidang sosial ekonomi juga masih banyak terjadi. Konflik perebutan lahan, pengusiran paksa seperti di Kulonprogo DIY, Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, Sumba Barat NTT merupakan contoh bagaimana hak-hak sosial ekonomi warga belum sepenuhnya dijamin pemerintah. Belum lagi berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan.

Peran dan Posisi INFID

Dalam 2 tahun ini INFID meneruskan program Kabupaten/Kota Ramah HAM (Human Rights Cities), dengan tujuan penerapan nilai-nilai HAM muncul dalam pelaksanaan pemerintahan. Tingkat partisipasi kota/kabupaten yang mengikuti kegiatan Loklatih Kota Ramah HAM (2018) pun meningkat menjadi 9 perwakilan kota/kabupaten (Kabupaten Sigi, Sambas, Buru, Pakpak Bharat, Kota Banjarmasin, Salatiga, Ambon, Jayapura, dan Denpasar). Selain perwakilan kota/kabupaten, juga hadir akademisi dan pegiat CSO dari berbagai daerah. Loklatih ini total diikuti peserta dari 15 daerah, gabungan dari perwakilan kota/kabupaten, akademisi, dan pegiat CSO.

Pada 13-15 November tahun 2018 INFID bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Festival Kota Ramah HAM “Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan” di Wonosobo, Jawa Tengah. Perwakilan dari kota/kabupaten, CSO, maupun akademisi hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga menghasilkan “Deklarasi Wonosobo untuk Indonesia yang Toleran, Inklusif dan Berkeadilan.” Festival HAM ini merupakan kegiatan tahunan dan salah satu langkah strategis INFID untuk pengarusutamaan HAM di kabupaten/kota di Indonesia.

Selain Kota Ramah HAM, INFID juga mendorong pengarusutamaan pelaksanaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*). Program Bisnis dan HAM bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif dan model praktik bisnis yang mendukung perlindungan dan pemenuhan HAM. Di tahun 2018, INFID meluncurkan “Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM” dan juga menyelenggarakan Regional Workshop on Business and Human Rights di Jakarta.

INFID juga menjalankan program PVE atau Preventing Violent-Extremism untuk ikut berkontribusi dalam membuat program dan mengadvokasi pencegahan ekstremisme di Indonesia sejak tahun 2016. Program ini lahir sebagai salah satu upaya INFID untuk mengarusutamakan narasi toleransi dan keberagaman di ruang publik untuk

pemenuhan HAM dan pengembangan demokrasi yang berkualitas melalui sejumlah kegiatan riset, advokasi, dan kampanye publik.

Pada tahun 2017, INFID bekerja sama dengan P3M meneliti 30 masjid di wilayah Jabodetabek dengan target lokasi di BUMN, kampus dan perumahan. Riset ini merupakan riset kebijakan yang dijadikan dasar advokasi kebijakan di tingkat pusat. Di samping itu, INFID juga mendiseminasikan hasil-hasil riset kepada berbagai pihak, seperti *development agencies* dan berbagai organisasi seperti Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Dewan Masjid, dan lain sebagainya. Ada beberapa respons pemerintah maupun masyarakat sipil terkait hal ini. Misalnya, beberapa pejabat publik memberikan statemen terkait persoalan ini, seperti Moeldoko, Gatot Nurmantyo, dan Lukman Hakim Syaifuddin. Di tahun 2018, Kementerian Agama juga mengeluarkan surat edaran yang berisi daftar nama pendakwah toleran di Indonesia. Pemerintah melalui BIN dan BNPT menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, INFID juga memproduksi beberapa kertas kebijakan yang berisikan rekomendasi untuk pencegahan ekstremisme di Indonesia. Rekomendasi ini telah disampaikan ke berbagai pihak, seperti BNPT, KSP, Wantimpres, dan lain sebagainya. Salah satu rekomendasi INFID kepada pemerintah (sejak 2016) adalah dibuatnya RAN (Rencana Aksi Nasional) untuk pencegahan ekstremisme di Indonesia. Pada tahun 2018, BNPT menginisiasi pembuatan RAN tersebut yang melalui mekanisme konsultasi publik. Saat ini RAN tengah menunggu pemberian izin dari presiden.

Sebagai bentuk kontra-narasi, INFID juga melakukan kampanye daring bersama NU Online dan Islami.co semenjak 2016. Berdasarkan ranking Alexa pada tahun 2016, 20 website Islam dengan jumlah kunjungan tertinggi, 19-nya diisi oleh narasi-narasi Islam intoleran. Hanya ada 1 website yang berisikan pesan damai, yaitu NU Online. Di tahun 2018, beberapa website Islam toleran mulai memasuki peringkat 20 teratas, salah satunya adalah Islami.co. Artinya pesan-pesan perdamaian dan moderatisme agama yang disebarkan INFID bersama dengan konsorsium telah sampai di khalayak luas. NU Online dan Islami.co juga menjadi media alternatif yang bisa menjadi rujukan masyarakat mengenai Islam.

BAB 3 | INFID DALAM MEDIA





Media Massa

Sepanjang tahun 2017, kegiatan INFID mendapat liputan sebanyak 243 pemberitaan yang meliputi 3 program utama HAM dan Demokrasi, Penurunan Ketimpangan, dan SDGs. Jumlah liputan di atas mayoritas dari media daring maupun cetak. Sementara liputan di televisi terpantau masih minim. Kegiatan INFID di tahun 2017 yang mendapatkan liputan di televisi paling banyak adalah Kampanye Publik SDGs Walk for Action (liputan khusus Metro TV).

Di tahun 2017 ada liputan dari media asing seperti Guardian, India Times, Aljazeera, The Associated Press (AP News) dan lain-lain. Isu yang diangkat adalah tentang situasi ketimpangan di Indonesia hasil survei INFID dan Oxfam dalam briefing paper "Menuju Indonesia Setara". Ini menunjukkan INFID memiliki kredibilitas untuk menjadi sumber berita isu ketimpangan di media asing.

Di tahun 2018 ada peningkatan signifikan liputan berita. Sampai Desember 2018, terpantau ada 582 pemberitaan kegiatan INFID. Ini juga terbantu dengan banyaknya kegiatan INFID sepanjang 2018. Namun media asing belum banyak yang meliput (hanya Anadolu Agency).

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan INFID, topik yang paling banyak diliput adalah soal hasil survei persepsi ketimpangan dan kasus intoleransi. Ini memang selaras dengan isu populer yang berkembang di publik.

Peluncuran hasil survei persepsi ketimpangan mendapatkan liputan, setidaknya ada lebih dari 50 pemberitaan. Dan beberapa media membuat tulisan mendalam dengan bahan hasil survei INFID ini (BBC.com dan Tirto.id).

Pada topik-topik yang sifatnya khusus dan mendalam, seperti kesetaraan gender, penerapan prinsip HAM dalam bisnis, perkawinan anak, dan lain-lain belum banyak media yang meliput. Namun pada tahun 2018, INFID berhasil mengemas isu SDGs yang khusus seperti sanitasi dan dikaitkan dengan kondisi di pesantren. Topik ini mendapatkan liputan yang lumayan banyak (11 media).

Media massa yang melakukan liputan sudah bervariasi, mulai dari media umum seperti detik.com, kompas.com sampai media khusus seperti Kontan dan Bisnis Indonesia. Juga beberapa media daerah seperti kabarmedan.com, riaonline.co.id, kilaskabar.com. Bahkan ada media komunitas seperti Nu.or.id , Koalisiperempuan.or.id, Jalandamai.org, dan lain sebagainya.

Dari media *online* (berita umum) yang menduduki ranking 10 tertinggi di Alexa, semua sudah pernah meliput kegiatan INFID. Di antaranya Tribunnews.com, Kompas.com, Detik.com, Kumparan.com, Suara.com, Liputan6.com, Okezone.com, Merdeka.com, CNNIndonesia.com, Sindonews.com. Namun frekuensinya yang sering meliput adalah Merdeka.com, Liputan6.com, Detik.com. Ke depan perlu ada perhatian khusus untuk merangkul media-media online yang memiliki coverage luas di Alexa (termasuk juga Tempo.co, Tirto.id yang berada di urutan 11, 12).

Pada media online, umumnya yang memberitakan adalah media online yang mengandalkan berita langsung (*news*) seperti merdeka.com, liputan6.com, detik.com dll. Media dengan karakter semacam ini akan memberitakan bila ada peristiwa atau kegiatan seperti media briefing, seminar, diskusi.

Sementara itu media online yang mengandalkan liputan mendalam seperti tirto.id, kumparan.com, kompas.id, katadata.com sudah tercatat membuat berita dengan mengandalkan data-data INFID, namun jumlahnya belum banyak. Liputan tentang INFID di media-media tersebut perlu diperbanyak lagi, agar publik mendapatkan informasi yang komprehensif.

Umumnya media yang menayangkan adalah media online. Ada beberapa media cetak seperti Kompas dan The Jakarta Post yang juga menurunkan liputan. Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan presensi INFID di media elektronik seperti TV maupun radio.

Media Sosial

INFID memanfaatkan media sosial sebagai salah satu cara kampanye. Di Facebook ada 7.210 pengikut dan Twitter 3.354 pengikut. Baru tahun 2017 dirintis penggunaan Instagram. Dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun pengikut Instagram INFID berhasil menembus angka 1.000 yaitu tepatnya 1.503 pengikut. Ini hal positif, karena Instagram saat ini menjadi media sosial utama bagi kaum muda (usia 15-39 tahun). Akun Twitter INFID sendiri telah mendapatkan verifikasi dari Twitter (tanda centang biru) pada September 2018. Verifikasi dapat meningkatkan kredibilitas akun sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan netizen sebagai sumber informasi.

INFID sudah merintis penggunaan channel Youtube. Meskipun sempat vakum selama kurang lebih 6 bulan, namun di pertengahan 2018 akun Youtube INFID menggeliat kembali. Konsistensi mengisi ruang Youtube patut dipertahankan, karena saat ini netizen Indonesia paling tinggi mengakses media sosial khususnya YouTube. Subscriber kanal Youtube INFID sudah mencapai 100 dan akan terus ditingkatkan lagi.

Penggunaan media sosial oleh INFID baru sebatas menginformasikan kegiatan-kegiatan INFID seperti Festival HAM, Lokaltatih, Seminar. Untuk di Instagram respon netizen cukup baik, rata-rata 40 akun memberikan like pada postingan di Instagram. Namun respon minim di Twitter dan Facebook (rata-rata di bawah 10 respon). Respon cukup tinggi adalah video di Instagram. Setiap video rata-rata mendapat tayang kembali di atas angka 100. Ini menunjukkan publik menyukai video dan tema-tema bahasan tertentu. Tidak selalu terkait kegiatan.

Baik di Facebook, Twitter, Instagram, maupun Youtube, belum banyak audiens yang memberikan komentar. Ini menandakan *engagement* akun INFID dengan para *follower*-nya perlu ditingkatkan. Membangun percakapan dengan publik secara reguler adalah salah satu cara untuk menyampaikan kampanye sesuai isu yang diadvokasi INFID.

BAB 4 | LAPORAN KEUANGAN

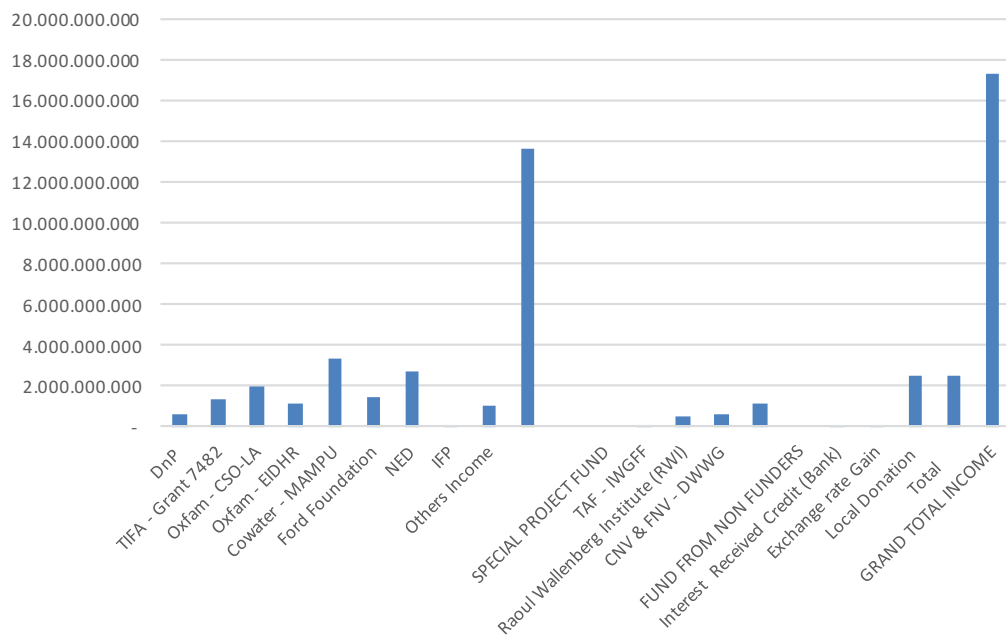
Sepanjang tahun 2017 INFID mengelola dana sebesar **13,190,005,236** yang berasal sebagian besar dari donor seperti British Embassy, OXFAM CSO-LA, OXFAM EIDHR, DNP - HRC, DCK, Ford Foundation, TIFA Foundation, DKK. Laporan Keuangan INFID tahun 2017 memperoleh status wajar dari auditor independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan.

Pada tahun 2018, anggaran program INFID naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar **14,998,403,000** rupiah. Ini menunjukkan naiknya kepercayaan lembaga donor ke INFID, baik dari nilai dana maupun adanya proyek-proyek baru dengan pendanaan besar seperti MAMPU dan NED (National Endowment for Democracy). Beberapa donor lainnya adalah OXFAM GB, OXFAM Indonesia, Ford Foundation, TIFA Foundation, TAF (The Asia Foundation), Robert Bosch Stiftung (RBSG), FNV (Netherland Trade Union).

Program tahun 2018 pendanaan terbanyak dialokasikan untuk isu HAM dan Demokrasi. Meski begitu isu HAM dan dua isu lain yang diadvokasi (SDGs dan Ketimpangan) masih saling terkait. Seiring dengan makin banyak program pembangunan yang terkait SDGs, INFID mengambil peran dan pendekatan HAM dan *inequality*.

Dalam menyusun anggaran, tahun 2018 menerapkan pendekatan secara holistik dalam implementasi sebuah program. Sehingga efektivitas anggaran makin terlihat.

Sumber-sumber dana Per Desember 2018



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : PHHARP/773/MA/Ary/2018

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Dewan Pengurus
**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**

*Board of Trustees
International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)*

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2017, and the statements of activities and changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) as of 31 December 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with, the Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Hal lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) secara keseluruhan. Laporan penerimaan dan beban yang berkaitan dengan dana para donor tidak merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah disajikan untuk informasi tambahan. Informasi tersebut telah menjadi obyek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan; dan, menurut pendapat kami menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

Other matter

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) taken as a whole. The income and expenditures statements pertaining to donors funds are not a required part of financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia and have been presented for additional information. Such information has been subjected to procedures applied in the audit of the financial statements; and in our opinion is fairly stated in all material respects in relation to the financial statements taken as whole.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Theo'.

Drs. Theo Kusnawara, Ak., CA, CPA

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0258

Izin Usaha KAP/*Business License* No. 855/KM.1/2017

30 April 2018

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan posisi keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2017

*International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)*
Statements of financial position
As of 31 December 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2017	2016	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2c, 3	3,289,706,867	3,866,980,734	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang lain-lain	4	13,300,000	97,193,517	<i>Other receivables</i>
Uang muka program	5	321,407,540	185,995,402	<i>Advance program</i>
Jumlah aset lancar		3,624,414,407	4,150,169,653	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset tetap	2d, 6			<i>Fixed assets</i>
Biaya perolehan		912,803,218	840,210,718	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi depresiasi		(528,386,530)	(398,040,397)	<i>Accumulated depreciation</i>
Jumlah aset tidak lancar		384,416,688	442,170,321	Total non current assets
Jumlah aset		4,008,831,095	4,592,339,974	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan posisi keuangan (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2017

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements of financial position (continued)
As of 31 December 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

Catatan/ Notes	2017	2016	
Liabilitas dan aset bersih			Liabilities and net assets
Liabilitas			Liabilities
Hutang lainnya	598,079,637	602,605,287	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	7 1,115,460,630	958,873,690	Accrued Expenses
Hutang pajak	8 38,239,765	24,418,369	Tax payable
Jumlah liabilitas	1,751,780,032	1,585,897,346	Total liabilities
Aset bersih			Net assets
Terikat	712,138,813	1,248,439,206	Restricted
Tidak Terikat	1,544,912,250	1,758,003,422	Unrestricted
Jumlah aset bersih	2,257,051,063	3,006,442,628	Total net assets
Jumlah liabilitas dan aset bersih	4,008,831,095	4,592,339,974	Total liabilities and net assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan aktivitas
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements of activities
For the year ended
31 December 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2017			2016	
		Restricted	Unrestricted	Total	Total	
PENERIMAAN	2e, 9					RECEIPTS
Dana dari donor		8,123,038,107	-	8,123,038,107	8,403,704,657	Fund from donors
Donor lain		3,089,189,452	-	3,089,189,452	967,800,948	Other donors
Dana dari non donor		176,033,544	1,801,744,133	1,977,777,677	2,733,563,917	Fund from non donors
Jumlah penerimaan		11,388,261,103	1,801,744,133	13,190,005,236	12,105,069,522	Total receipts
BEBAN PROGRAM	2e, 10, 11					PROGRAM EXPENDITURES
Penelitian dan publikasi		1,681,211,412	137,952,423	1,819,163,835	2,438,547,038	Research and publication
Tindakan advokasi/politik		1,731,611,268	6,172,500	1,737,783,768	2,188,912,246	Advocacy/political action
Publikasi, dokumentasi, dan informasi		336,072,150	22,395,281	358,467,431	104,180,000	Publication, documentation, and information
Pengembangan kapasitas		2,698,555,507	-	2,698,555,507	1,592,336,306	Capacity development
Biaya personil		3,161,733,940	227,991,667	3,389,725,607	2,941,749,000	Personnel cost
Institusional		223,465,256	1,210,441,294	1,433,906,550	1,030,231,561	Institutional
Layanan administrasi umum		811,936,298	409,882,140	1,221,818,438	998,136,822	Administration general service
Pengeluaran proyek khusus		1,279,975,665	-	1,279,975,665	132,132,917	Special project expenditure
Jumlah kegiatan program		11,924,561,496	2,014,835,305	13,939,396,801	11,426,225,890	Total program activities
Perubahan dalam aset bersih		(536,300,393)	(213,091,172)	(749,391,565)	678,843,632	Changes in net asset

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan perubahan aset bersih
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017

*International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)*
Statements of changes in net assets
For the year ended
31 December 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	Restricted	Unrestricted	Total	
Aset bersih 31 Desember 2015		1,254,950,013	1,072,648,983	2,327,598,996	<i>Net assets, 31 December 2015</i>
Perubahan dalam aset bersih		(6,510,807)	685,354,439	678,843,632	<i>Changes in net assets</i>
Aset bersih, 31 Desember 2016		1,248,439,206	1,758,003,422	3,006,442,628	<i>Net assets, 31 December 2016</i>
Perubahan dalam aset bersih		(536,300,393)	(213,091,172)	(749,391,565)	<i>Changes in net assets</i>
Aset bersih, 31 Desember 2017		712,138,813	1,544,912,250	2,257,051,063	<i>Net assets, 31 December 2017</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan arus kas
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements of cash flows
For the year ended
31 December 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2017	2016	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Perubahan dalam aset bersih	(749,391,565)	678,843,632	<i>Changes in net assets</i>
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi:			<i>Adjustment to reconcile changes in net assets to net cash used in operating activities:</i>
Rugi atas pengurangan aset tetap	-	9,853,250	<i>Loss on of disposal fixed assets</i>
Biaya depresiasi (Kenaikan)/penurunan piutang	130,346,133	101,323,933	<i>Depreciation expense (Increase)/decrease in receivables</i>
(Kenaikan)/penurunan uang muka	83,893,517	(82,457,317)	<i>(Increase)/decrease in advance</i>
Kenaikan hutang program	(135,412,138)	172,599,944	<i>Increase in account payable program</i>
Kenaikan/(penurunan) hutang non-program	429,990,784	1,012,763,886	<i>Increase/(decrease) in account payable non program</i>
Kenaikan/(penurunan) hutang pajak	(277,929,494)	182,725,001	<i>Increase/(decrease) in tax payable</i>
	13,821,396	(37,034,969)	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(504,681,367)	2,038,617,360	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Pembelian aset tetap	(72,592,500)	(374,135,778)	<i>Purchase of fixed assets</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(72,592,500)	(374,135,778)	<i>Net cash used in investing activities</i>
Kenaikan kas dan setara kas bersih	(577,273,867)	1,664,481,582	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas, awal tahun	3,866,980,734	2,202,499,152	<i>Cash and cash equivalents, at beginning of year</i>
Kas dan setara kas, akhir tahun	3,289,706,867	3,866,980,734	Cash and cash equivalents, at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

Kepada Yth.

Direksi

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**

Laporan audit atas laporan keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

To

Board of Directors

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**

Auditing report for financial statements

We have audited the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018 and the income statement, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with statement of Financial Accounting Standards that applied in Indonesia and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

Opini

Menurut opini kami International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Auditor Independen lain dengan nomor Laporan PHHARP/773/MA/Ary/2018 tanggal 30 April 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019


Opinion

In our opinion the accompanying financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) present fairly without exceptional in all material respects, the financial position of Desember 31, 2018 and their financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Things

The Financial Statements for the year ended 31 December 2017 have been audited by another Independent Auditor with Report number PHHARP/773/MA/Ary/2018, April 30 2018, with reasonable opinions in all material matters.

KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan Jakarta
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 946/KM.1/2015


M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP
Register Akuntan Publik Nomor AP. 1052
Register IAPI Nomor 2198

Jakarta, 27 Mei 2019 / May 27, 2019

Jakarta Office :

ARVA Building 5th Floor Jl. RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Telp / Fax : (+62 21) 391 75 88 / (+62 21) 213 933 18

Mobile : +62 878 389 00 901 / +62 822 4342 7888

E-mail : kapkuncara@gmail.com / kuncara@kksppartners.com

Website : www.kuncara.co.id / www.kksppartners.com

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan posisi keuangan**
Pada tanggal 31 Desember 2018

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID) Statements
of financial position**
As of 31 December 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2c, 3	5.674.737.592	3.289.706.867	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	4	72.598.826	13.300.000	Other receivables
Uang muka program	5	386.055.700	321.407.540	Advance program
Jumlah aset lancar		6.133.392.118	3.624.414.407	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	2d, 6	935.230.084	912.803.218	Acquisition cost
Akumulasi depresiasi		(935.230.084)	(528.386.530)	Accumulated depreciation
Jumlah aset tidak lancar		-	384.416.688	Total non current assets
Jumlah aset		6.133.392.118	4.008.831.095	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan posisi keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements of financial position
As of 31 December 2018

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2018	2017	
Liabilitas dan aset bersih				<i>Liabilities and net assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Utang Program	7	526.888.175	1.092.744.537	<i>Account Payable Program</i>
Utang Non Program	7	-	22.716.093	<i>Account Payable Non Program</i>
Utang Pajak		79.710.746	38.239.762	<i>Tax Payable</i>
Jumlah liabilitas		606.598.921	1.751.780.032	<i>Total liabilities</i>
Aset bersih				<i>Net assets</i>
Terikat		3.232.953.957	712.138.813	<i>Restricted</i>
Tidak Terikat		2.293.839.240	1.544.912.250	<i>Unrestricted</i>
Jumlah aset bersih		5.526.793.197	2.257.051.063	<i>Total net assets</i>
Jumlah liabilitas dan aset bersih		6.133.392.118	4.008.831.095	<i>Total liabilities and net assets</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan aktivitas
Pada tanggal 31 Desember 2018**

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Statements of activities
As of 31 December 2018**

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2018			2017			
	Terikat/ Restricted	Tidak Terikat/ Unrestricted	Jumlah/Total	Terikat/ Restricted	Tidak Terikat/ Unrestricted	Jumlah/Total	
PENERIMAAN							RECEIPTS
Dana dari donor	13.228.742.979	-	13.228.742.979	8.123.038.107	-	8.123.038.107	Fund from donors
Donor lain	1.109.119.132	-	1.109.119.132	3.089.189.452	-	3.089.189.452	Other donors
Dana dari non-donor	352.208.627	2.604.314.493	2.956.523.120	176.033.544	1.801.744.133	1.977.777.677	Fund from non-donors
Jumlah penerimaan	14.690.070.738	2.604.313.493	17.294.385.231	11.388.261.103	1.801.744.133	13.190.005.236	Total receipts
BEBAN PROGRAM							PROGRAM EXPENDITURES
Penelitian dan publikasi	2.859.286.812	51.643.770	2.910.930.582	1.681.211.412	137.952.423	1.819.163.835	Research and publication
Tindakan advokasi/politik	1.801.304.159	96.567.857	1.897.872.016	1.731.611.268	6.172.500	1.737.783.768	Advocacy/political action
Publikasi, dokumentasi, dan informasi	168.200.000	-	168.200.000	336.072.150	22.395.281	358.467.431	Publication, documentation, and information
Pengembangan kapasitas	872.370.993	-	872.370.993	2.698.555.507	-	2.698.555.507	Capacity development
Biaya personil	3.394.295.691	285.199.333	3.679.495.024	3.161.733.940	227.991.667	3.389.725.607	Personnel cost
Institusional	217.822.943	603.105.946	820.928.889	223.465.256	1.210.441.294	1.433.906.550	Institutional
Layanan administrasi umum	829.327.402	446.101.128	1.275.428.530	811.936.298	409.882.140	1.221.818.438	General administration service
Pengeluaran proyek khusus	2.026.647.594	-	2.026.647.594	1.279.975.665	-	1.279.975.665	Special project expenditure
Jumlah kegiatan program	12.169.255.594	1.482.618.034	13.651.873.628	11.924.561.496	2.014.835.305	13.939.396.801	Total program activities
Penyesuaian Aset Bersih Tahun Lalu	-	(372.769.469)	(372.769.469)	-	-	-	Adjustment of last year's net assets
Perubahan dalam aset bersih	2.520.815.144	748.926.990	3.269.742.134	(536.300.393)	(213.091.172)	(749.391.565)	Changes in net asset

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan perubahan aset bersih
Pada tanggal 31 Desember 2018**

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Statements of changes in net assets
As of 31 December 2018**

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Restricted	Unrestricted	Total	
Aset bersih, 31 Desember 2016	1.248.439.206	1.758.003.422	3.006.442.628	<i>Net assets, 31 December 2016</i>
Perubahan dalam aset bersih	(536.300.393)	(213.091.172)	(749.391.565)	<i>Changes in net assets</i>
Aset bersih, 31 Desember 2017	712.138.813	1.544.912.250	2.257.051.063	<i>Net assets, 31 December 2017</i>
Perubahan dalam aset bersih	2.520.815.144	748.926.990	3.269.742.134	<i>Changes in net assets</i>
Aset bersih, 31 Desember 2018	3.232.953.957	2.293.839.240	5.526.793.197	<i>Net assets, 31 December 2018</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan arus kas**
Pada tanggal 31 Desember 2018

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
statements of cash flow**
As of 31 December 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

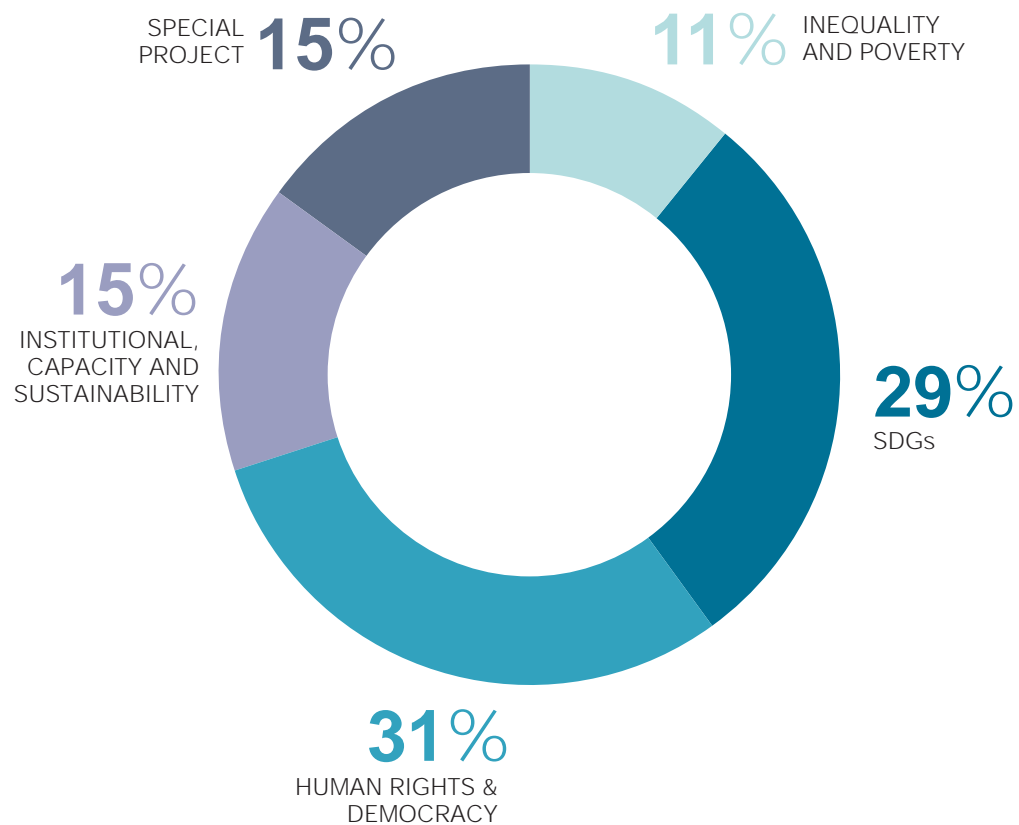
(Expressed in Rupiah)

	2018	2017	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Perubahan dalam aset bersih	3.269.742.134	(749.391.565)	Changes in net assets
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi:			Adjustment to reconcile changes in net assets to net cash used in operating activities:
Rugi atas pengurangan aset tetap			Loss on fixed assets deduction
Biaya depresiasi (Kenaikan)/penurunan piutang	406.843.554	130.346.133	Depreciation expense (Increase)/decrease in receivables
(Kenaikan)/penurunan uang muka	(59.298.826)	83.893.517	(Increase)/decrease in advance
Kenaikan hutang program	(64.648.160)	(135.412.138)	Increase in account payable program
Kenaikan/(penurunan) hutang non-program	(1.163.935.999)	429.990.784	Increase/(decrease) in account payable non program
Kenaikan/(penurunan) hutang pajak	18.754.887	(277.929.494)	Increase/(decrease) in tax payable
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.407.457.591	(504.681.367)	Net cash obtained from (used for) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Pembelian aset tetap	(22.426.866)	(72.592.500)	Purchase of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(22.426.866)	(72.592.500)	Net cash used in investing activities
Kenaikan kas dan setara kas bersih	2.385.030.725	(577.273.867)	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas, awal tahun	3.289.706.867	3.866.980.734	Cash and cash equivalents, at beginning of year
Kas dan setara kas, akhir tahun	5.674.737.592	3.289.706.867	Cash and cash equivalents, at end of year

ACTIVITIES	ACTUAL
FUND FROM FUNDER	
DnP	581.695.760
TIFA - Grant 7482	1.382.285.780
Oxfam - CSO-LA	2.003.563.626
Oxfam - EIDHR	1.093.729.776
Cowater - MAMPU	3.281.652.489
Ford Foundation	1.430.020.550
NED	2.659.055.000
IFP	113.906.800
Others Income	1.057.567.775
Total	13.603.477.556
SPECIAL PROJECT FUNDERS	
TAF - IWGFF	52.068.945
Raoul Wallenberg Institute (RWI)	456.625.000
CNV & FNV - DWWG	639.778.392
Total	1.148.472.337
FUND FROM NON FUNDERS	
Interest Received Credit (Bank)	41.024.315
Exchange rate Gain	4.368.880
Local Donation	2.497.042.142
Total	2.542.435.337
GRAND TOTAL INCOME	17.294.385.230

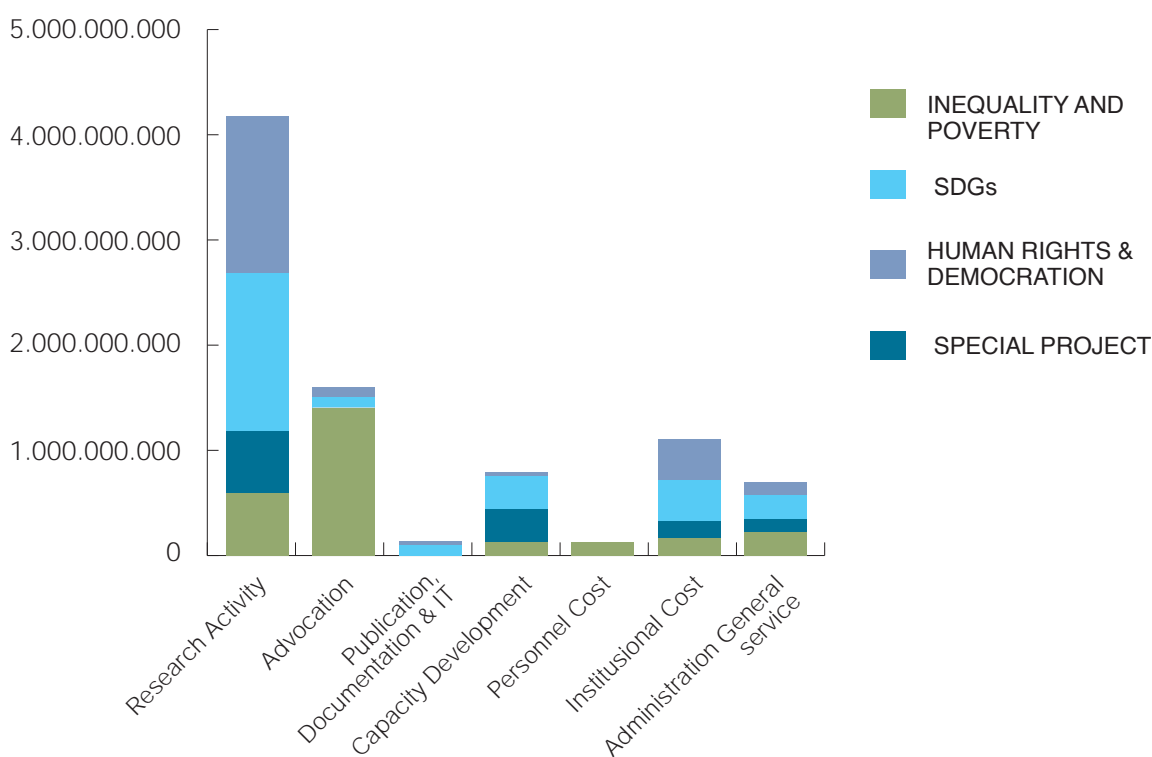
Biaya setiap Program per Desember 2018

No.	DESCRIPTION	EXPENDITURE	%
1	INEQUALITY AND POVERTY	1.487.093.666	11%
2	SDGs	3.855.047.022	29%
3	HUMAN RIGHTS & DEMOCRACY	3.956.686.427	30%
4	SPECIAL PROJECT	2.026.581.563	15%
5	INSTITUTIONAL, CAPACITY AND SUSTAINABILITY	2.038.232.631	15%
Total		13.363.641.309	100%



Expenditure for January - December 2018

No	Aktivitas	INEQUALITY AND POVERTY	SDGs	HUMAN RIGHTS & DEMOCRATION	SPECIAL PROJECT
1.	Research Activity	591.497.445	823.719.519	1.495.713.618	744.324.617
2.	Advocation	44.516.950	1.403.653.188	449.701.878	99.439.091
3.	Publication, Documentation & IT	70.700.000	-	97.500.000	37.998.860
4.	Capacity Development	127.188.271	431.629.723	313.552.999	259.954.271
5.	Personnel Cost	653.191.000	1.196.044.592	1.600.217.932	732.083.448
6.	Institusional Cost	164.231.547	251.126.560	389.543.848	31.966.933
7.	Administration General service	221.398.635	515.247.273	489.691.503	127.807.607
	Total	1.872.723.848	4.621.420.855	4.835.921.778	2.033.574.827





BAB 5 | LAMPIRAN

Daftar Kegiatan INFID 2017-2018

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	13-Jan-17	Konsinyering Rencana Akasi SDGs	Jakarta, Kantor INFID
2	16-Jan-17	"Seminar Surabaya Menolak Intoleransi, Melawan Radikal "	Surabaya
3	23-Jan-17	Training untuk Pelatihan UNGP-BHR untuk Buruh dan Petani	Jakarta, Fave, Kemang
4	24-Jan-17	Meeting ASEAN Power Analysis & Mapping	Jakarta, Kantor INFID
5	26-Jan-17	Peer Review Laporan Ketimpangan Indonesia	Jakarta, ASTON Hotel
6	16/19-Feb-2017	Training Jurnalis	Pontianak, Golden Tulip
7	23-Feb-17	Peluncuran Laporan Ketimpangan "Menuju Indonesia yang Setara"	Jakarta, Aryaduta Hotel
8	28-Feb-29-Mart-2017	Pelatihan Bagi Anggota Serikat Buruh dan Serikat Tani tentang Bisnis dan HAM di sektor Industri Pertanian, Pangan Khususnya Perkebunan Sawit	Medan
9	1/2-Mart-2017	Pelatihan BHR untuk Serikat Buruh dan Petani di Medan	Medan
10	05-May-17	Rapat Pertemuan INFID dengan NED	Jakarta
11	10-May-17	FGD Evaluasi Eksternal INFID	
12	17-May-17	"Diskusi Terfokus Background Paper Unemployment Insurance"	Jakarta, ASTON Hotel
13	23-May-17	Lunching dan Diskusi Publik "Ketimpangan di Mata Warga"	Jakarta, Tjiki Lima
14	24-May-17	Worshop Pegiat Sosial Media untuk Kampanye kontra Ekstremisme Kekerasan	Solo, Sarila Hotel
15	26-May-17	Peer Review Kajian Ketenagakerjaan	Jakarta, Kantor INFID
16	31-May-17	Rapat Persiapan Dialog dengan Sherpa G20	Jakarta, Kantor INFID
17	15-Jun-17	"Diskusi Terfokus Background Paper Unemployment Insurance"	Jakarta, Griya Patria

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
18	15-Jun-17	Penggunaan Sosial Media Kerja-Kerja Kampanye dua Advokasi kelompok Masyarakat Sipil	Jakarta, Kantor INFID
19	10-Jul-17	Rapat Update HRC dengan Human right Task Force Wonosobo	Wonosobo
20	31-Jul-17	Peluncuran 3 buku dan Meredam Ekstrimisme Kekerasan Melalui Buku	Jakarta, Kekini
21	16-Aug-17	Pertemuan Terbatas Pemajuan dan Perluasan Kabupaten/Kota HAM dan Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dengan Kekerrasan	Wisma PGI, Jakarta
22	30-Aug-17	Konferensi Pers 10 Cara Menurunkan Ketimpangan Gender di Indonesia	Jakarta, Kekini Cikini 43
23	04-Sep-17	Pertemuan dengan SKPD,DPRD,CSO dan WRO untuk Penyusunan Kerangka kerja Advokasi RAD Kabupaten Maros	Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kantor Bupati Maros
24	07-Sep-17	SEMINAR dan LOKAKARYA "Mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (Sustainable Development Goal's/SDGs Dalam Rangka Penyelarasan Arah Pembangunan daerah Menuju Tujuan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2030	Jember
25	20-Sep-18	FGD Peran Swasta dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia	Kantor INFID, Jakarta
26	26-Sep-17	Konferensi Pers Dua Tahun SDGs, Pemerintah Masih Jalan di Tempat	Jakarta, Kekini Cikini 43
27	27/28-Sept-2018	Workshop Penguatan Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Kerja Layak	Yogyakarta
28	13-Oct-17	Rapat "Koordinasi IBS Pasca Pengumpulan Data"	Jakarta, Kantor INFID
29	25-Oct-17	"Kunjungan Masyarakat Sipil ke BLK Bekasi: Menggali Pengalaman BLK dalam Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi"	BLK, BEKASI
30	14-Nov-2018	Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SD SDGs Indonesia yang Maju, Adil dan Setara: Peran Perempuan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs	Hotel Ambhara, Jakarta
31	6-7 Desember 2018	Konferensi Kabupaten/Kota HAM 2018	Hotel Manhattan, Jakarta

Program SDGs

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	16-Jan-18	Diskusi Terpokus " Mempersiapkan Tim Koordinasi Nasional SDG's yang Efektif dan Partisipatif	Hotel JS Luwansa : Jl. H. R. Rasuna Said Jakarta Selatan
2	02-Feb-18	Peer Review Penulisan RAN SDGs	Bangi Kopi Ps. Minggu - Jakarta Selatan
3	08-Feb-18	Konferensi Pers "Survey Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga"	Restauran Pisa Cafe Menteng Jakarta
4	27-Mar-18	Dialog Kebijakan SDGs "Menemukan Bentuk Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dalam Rangka Memperkuat Kesiapan dan Pelaksanaan SDGs di Indonesia"	Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara No.1, Menteng, Jakarta Pusat
5	02-Apr-18	Konferensi Pers "Survey Sanitasi Berbasis Pesantren di Kab.Tangerang"	Tjikini Lima, Jakarta Pusat
6	04-Apr-18	Rapat Penyusunan Perumusan RAD SDGs Kab. Maros	Maros
7	25-Apr-18	Undangan dalam acara Dialog Kebijakan SDGs "Kerangka Fiskal Yang Diperlukan Untuk Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan SDGs di Kabupaten Kota"	Grand Cemara Hotel, Jl. Cemara 1. Jakarta Pusat
8	15-May-18	Konsolidasi Persiapan RPJMD 2019-2023, Launching Perda KLHS	Hotel Bidakara Jakarta
9	02-Aug-18	Workshop Penyusunan TOR: Tata Kelola dan Akuntabilitas Pelaksanaan SDGs di Indonesia	Grand Cemara, Jl. Cemara 1 . Menteng – Jakarta Pusat
10	08-Aug-18	Menyikapi Angka Kemiskinan di Indonesia dan Pencapaian SDGs	Tjikini Lima Restoran, jl. Cikini 1 No. 5 – Jakarta Pusat
11	14-Aug-18	Peluncuran Program Workshop Sinergi "SDGs! 2030 Memperkuat Pelibatan Masyarakat Sipil dan Organsiasi Perempuan di dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs yang Responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif"	Jakarta
12	05/6-Sept-2018	Lokakarya Memperkuat Pelibatan Universitas dalam Pelaksanaan & Pencapaian SDGs	Greenhost Hotel, Yogyakarta
13	12-Sep-18	Peer ReviewKertas Posisi Mekanisme Tata Kelola Akuntabilitas Pelaksanaan SDG di Indonesia	Grand Cemara , Jakarta

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
14	20-Sep-18	Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs Konsolidasi Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia	Aryaduta Hotel, Jakarta
15	25-Sep-18	FGD Penyusunan Metode & Instrument Riset Kecukupan Fiskal SDGs	Hotel Ashley, Jl Wahid Hasyim Menteng – Jakarta Pusat
16	27/28-Sept-2018	Lokakarya Memperkuat Pelibatan Universitas dalam Pelaksanaan & Pencapaian SDGs	Bojonegoro
17	24/26-Oktober 2018	Loklatih Pembiayaan: Penilaian Fiskal untuk Pencapaian SDGs yang Berperspektif Gender, Inklusif, dan Transformatif	Hotel Swiss-belinn Tunjungan, Surabaya
18	13-14 Desember 2018	Media Briefing dan Training Storytelling untuk Peliputan SDGs	

Program KETIMPANGAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	23-Jan-18	Diskusi dan Konferensi Pers “Merrespon Forum Ekonomi Dunia 2018: Tentang Penurunan Ketimpangan di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia”	Tkini Lima. Jl. Cikini Lima 1 No. 5, Jakarta Pusat.
2	01-Mar-18	Media Briefing on Inequality and Intolerance	Tkini Lima. Jl. Cikini Lima 1 No. 5, Jakarta Pusat.
3	08-Mar-18	Diskusi dan Konferensi Pers “Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia”	Tkini Lima. Jakarta Pusat.
4	07-Apr-18	Workshop Finalisasi Policy Paper Kerja Layak	Kantor INFID, Jakarta Selatan
5	08-May-18	Diskusi dan Konferensi Pers “Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia”	Tkini Lima. Jakarta Pusat.
6	16-May-18	Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018 “ Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD”	Hotel Bidakara, Jakarta Selatan
7	30-May-18	Diskusi dan Buka Puasa Bersama: “Menjawab Tantangan Ketersediaan dan Kebutuhan Kerja Guna Menurunkan Ketimpangan di Indonesia dalam perspektif Pekerja”.	Kantor INFID, Jakarta Selatan

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
8	31-Jul-18	Diskusi Kebijakan Ketenagakerjaan "Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Perluasan Kesempatan Kerja"	Hotel Ashley, Jakarta Pusat
9	14-Aug-18	Peluncuran Program Workshop Sinergi "SDGs 2030 Memperkuat Pelibatan Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan di dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs yang responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif"	Hotel Ashley, Jakarta Pusat
10	29-Aug-18	Rapat Koordinasi TIM Peneliti Fiskal SDGs	Tjiki Lima Restoran, Jakarta Pusat
11	19-Oct-18	Meeting with NGOs from China, re: Inequality	Kantor INFID, Jakarta Selatan
12	24-Oct-18	Konsultasi LBH Pers dan INFID mengenai strategi dan Kerangka Kerja masyarakat sipil dalam kurun waktu 5 tahun ke depan	Hotel ASTON – Jakarta Selatan
13	06-Nove-2018	Diskusi "Digitalisasi dalam Struktur Perkonomian Indonesia"	Kantor INFID, Jakarta Selatan
14	12/13-Des-2018	Lokalah "Penguatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil: Kesempatan Kerja dan Industri 4,0"	Hotel ASTON – Semarang

Program CVE

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	06-Mar-18	Audensi/Kunjungan Junior CHAMBER INTERNATIONAL	Kantor INFID, Jakarta Selatan
2	09-Mar-18	Diskusi Buku AS.Hikam "Deradikalisasi: Peren Masyarakat Sipil Indonesia Membangun Radikalisme"	Cemara Hotel, Jakarta Pusat
3	29-Mar-17	Presentation of Mosque Research INFID	Aston Hotel. Jl. TB Simatupang - Jakarta Selatan
4	18-May-18	Poetry for Integrity " Guedan Reformasi"	Kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat
5	06-Jun-18	Diskusi dan Buka Puasa Bersama "Revisi UU Tindak Pidana Terorisme Disahkan; Seperti apa Urgensi dan Kontestasinya?".	Sekretariat INFID, Jl. Jatipadang Raya, Kav. 3- No105. Ps.Minggu – Jakarta Selatan

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
6	05-Sep-18	Peliputan Media Briefing “ Bebaskan Meiliana : Negara Wajib Memberikan Keadilan bagi Semua”	Tjikini Lima Restoran, Jakarta Pusat
7	18-Sep-18	Coordination Meeting for Developing Amicus Curiae - Meiliana	Bakumsu - Medan
8	30-Sep-18	Diskusi Buku”Genosida dan Moderenitas (Dalam Bayang bayang Auschwitz)	Tjikini Lima – Jakarta Pusat
9	24-Oct-18	Konsultasi LBH Pers dan INFID Mengenai strategi dan kerangka kerja Masyarakat sipil dalam kurun waktu 5 tahun ke depan	Hotel ASTON - Jakarta Selatan
10	06-Nov-2018	Pertemuan Koordinasi Riset PVE	Kantor INFID, Jakarta Selatan
11	30-Nov-2018	SEMINAR NASIONAL “Urgensi dan Strategi Pencegahan Exstremisme di Indonesia”	Kampus STIF Sadra

Program HAM

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	21-Feb-18	Diskusi “ Bincang-bincang Toleransi dan Perdamaian di Bulan Kasih Sayang ; Anak Muda Bertemu Pembuat Kebijakan”	Rumah Kembang Kencur, Jl. Pejaten Barat No. 16A. Ragunan – Jakarta Selatan
2	02 Mei 2018	Loka Latih Kabupaten/ Kota HAM (Human Rights Cities) bagi Pemerintah Daerah dan Kelompok	Rama Bech Resort and Villas, Kuta - Bali
3	03 Mei 2018	Loka Latih Kabupaten/ Kota HAM (Human Rights Cities) bagi Pemerintah Daerah dan Kelompok	Rama Bech Resort and Villas, Kuta - Bali
4	03-Agu-18	Diskusi Publik “Memastikan Praktik Bisnis yang Melindungi dan Menghormati HAM di Indonesia”	Medan
5	9/10-Agu-2018	Focus Group Discussion - Memastikan Praktik Bisnis yang Melindungi dan Menghormati HAM di Indonesia	Pontianak - KALBAR
6	18-Sep-18	Coordination Meeting for Developing Amicus Curia-Meiliana	Bakumsu - Medan
7	20-Oct-18	World Human Rights Cities Forum 2018 “Human Rights Cities and SDGs in Indonesia : Good Pratices and Chalengers”. KIM Daejung Center, Gwangju	KIM Daejung Center, Gwangju - Korea

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
8	13/15-Nove-2018	Festival HAM 2018 "Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas : Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan	PEMKAB WONOSOBO – Jawa Tengah
9	13 Desember 2018	Pesta Rakyat Perayaan Hari HAM	Toba Samosir, Sumatera Utara
10	19 Desember 2018	NGOs Dialogue on Fostering Democracy on Malaysia, Indonesia, and Beyonds	Jakarta

DAFTAR PUBLIKASI INFID 2017-2018

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN
1	Buku Panduan Goal 5 - Gender	Yekti Hesti Murthi Dian Kartikasari Misiyah Zumrotin K. Susilo Siti Khoirun Nikmah Hamong Santono	2017 September
2	Buku Panduan HRC		2018 Februari
3	Buku Indeks Barometer Sosial 2016	Bagus Takwin M. Himawan Arifianto Alfindra Primaldhi Paksi Walandow Sahat K. Panggabean	2017 Mei
4	Buku Rencana Aksi SDGs	Mickael Bobby Hoelman	2017 Maret
5	Buku Laporan Ketimpangan Sosial 2016	Bagus Takwin M. Himawan Arifianto Alfindra Primaldhi Paksi Walandow Sahat K. Panggabean	2017 Mei
6	Panduan Advokasi Kebijakan Kerja Layak	Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kerja Layak	2018 Maret
7	Kertas kebijakan kabupaten / kota ham sebagai strategi pelaksanaan hak asasi manusia di daerah dan peran pemerintah pusat		2017 Desember
8	Panduan teknis tujuan pembangunan berkelanjutan: tujuan 8 pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak	Indrasari Tjandraningsih Siti Khoirun Nikmah Anis Hidayah Wahyu Susilo Ah Maftuchan Hamong Santono	2018 Januari

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN
9	Studi Kebijakan Anggaran Ketenagakerjaan Indonesia	Abdul Waidl Rohidin Sudarno	2017 Oktober
10	Pengukuran Ketimpangan Sosial 2016	Bagus Takwin M. Himawan Arifianto Alfindra Primaldhi Paksi Walandow Sahat K. Panggabean	2017 Mei
11	Pemenuhan Penganggaran SDG's untuk Pengentasan Kemiskinan dan Kesetaraan Gender	Abdul Waidl Achmad Taufiq Salbiyah	2017
12	Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		2017
13	Policy Brief: Pentingnya Penyusunan Peraturan Presiden bagi Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM		2018
14	Prosiding konferensi INFID Kabupaten/kota HAM 2017		2017 Desember
15	Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		2017 November
16	Policy Paper Six Policy Recommendations on Vocational Training		2018 Juli
17	Lima cara menurunkan ekonomi ketimpangan		2017 Agustus
18	Pelatihan sustainable development goals kerangka modul		2017 Januari
19	Background Paper Global Governance For the Future: Digitalization and Decent Work	Indrasari Tjandraningsih & Siti Khoirun Nikmah	2018 November
20	Laporan dan Resolusi Dewan HAM Tahun 2018 di Dewan HAM PBB		2018 Oktober
21	Kertas Kebijakan Tujuh Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi		2018 Juli
22	Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia		2018 Oktober
23	Ringkasan Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia		2018 Oktober

NO	JUDUL	PENULIS	TAHUN
24	Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia	Iman Prihandono Rully Sandra	2018 Oktober
25	Synthesis Policy Paper on Decent Work for Young Persons and Women at the National Level and in 5 Districts/Cities in Indonesia		2018 Oktober
26	Sintesa Kertas Kebijakan Kerja Layak untuk Anak Muda dan Perempuan Nasional dan Lima Kabupaten/Kota di Indonesia		2018 Oktober
27	Policy Paper Six Policy Recommendations on Vocational Training		2018 Juli
28	LEAFLET Pentingnya Penyusunan Peraturan Presiden bagi Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM		2018 Oktober
29	Cross Country Report on Trends of Extremism in Southeast Asia		2018 Oktober
30	Catatan Intoleransi di Indonesia		2018 November
31	Wonosobo Kabupaten HAM		2018 November
32	Policy Paper Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme		2018 November
33	Background Paper Global Governance of The Future: Digitalization and Decent Work		2018 November



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:



infid



infid_ID



infid_ID